

Judul : DPR desak RUU LLAJ dibahas Badan Legislatif
Tanggal : Sabtu, 22 Agustus 2020
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 2

DPR Desak RUU LLAJ Dibahas Badan Legislatif

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) mendesak untuk segera dibahas di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR. Selain sudah cukup lama diwacanakan untuk direvisi, perkembangan zaman juga terus menuntut adanya penyesuaian regulasi mengenai moda transportasi dan infrastrukturnya. Terlebih RUU tersebut telah banyak mendapat masukan dari para pakar dan pemangku kepentingan, termasuk telah siap naskah akademiknya.

"Saya kira sudah saatnya RUU LLAJ masuk ke pembahasan Baleg. Segala sesuatunya sudah terpenuhi. Apalagi wacana revisi sudah dari periode lalu. Akan banyak mudaratnya kalau hal ini ditunda terus-menerus," kata Wakil Ketua Komisi VDPR Syarif Abdullah Alkadrie kemarin.

Menurut dia, perkembangan teknologi informasi semakin hari terus merongrong adanya perubahan regulasi terkait moda transportasi dan moda LLAJ lain. Jika tidak ada progres dalam pembahasan mengenai revisi RUU ini, peri kehidupan LLAJ akan selalu tertinggal. Akibatnya, berbagai efek negatif akan menyertainya. "Dari kegagapan kita memberikan perlindungan terhadap warga negara hingga praktik-praktik koruptif yang tak terelakkan," tutur politisi Partai NasDem ini.

Syarif mengatakan, kebutuhan revisi RUU LLAJ tidak hanya bentuk dari penyesuaian zaman yang berubah. Revisi merupakan wujud dari upaya untuk menunaikan amanat konstitusi, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi dimensinya bukan

mendorong pertumbuhan ekonomi belaka. Tapi, lebih dari itu, mewujudkan keadilan sosial yang menjadi amanat konstitusi," ungkap politisi dari daerah pemilihan Kalimantan Barat ini.

Dia mengungkapkan, bentuk dari keadilan sosial itu tidak hanya diaturnya moda transportasi daring, tetapi juga pemenuhan aspek keadilan dalam pembangunan jalan di Tanah Air. Demikian juga aspek-aspek lain seperti administrasi dalam kendaraan seperti SIM, STNK, hingga BPKB. "Semuanya mesti beraras pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau KTP bisa seumur hidup, mengapa SIM tidak? Toh, kemampuan mengendarai kendaraan tidak pernah hilang, apalagi tiap lima tahun sekali. Demikian juga unsur-unsur dalam STNK maupun BPKB, misalnya," urai Syarif.

Wakil Ketua Komisi VDPR Nurhayati Monoarfa sebelumnya menekankan RUU LLAJ harus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yakni dengan *grand design* pembangunan jalan yang terkoneksi dari hulu ke hilir dan memajukan kesejahteraan umum. Tentu, tanpa mengabaikan aspek *security* dan *safety* yang juga menjadi prioritas utama pembahasan RUU LLAJ.

"Mendorong perekonomian nasional ini adalah roh RUU LLAJ. RUU LLAJ ini juga harus mendorong perekonomian nasional. Tentu, jalan yang terkoneksi dari hulu ke hilirnya dan memajukan kesejahteraan umum. Dengan *security* dan *safety* yang menjadi yang utama untuk pembahasan UU LLAJ berikutnya," ujar politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tersebut.

 **sindonews**